

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemenuhan perlindungan khusus korban sodomi anak yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms. berdasarkan pada kesesuaian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan diidentifikasi berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan putusan nomor 142/pid.sus/2025/pn.cms serta kendala-kendalanya dan upaya-upayanya.

Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang dimana Metode yuridis adalah metode pendekatan dalam studi hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma dan peraturan hukum tertulis yang berlaku, sedangkan deskriptif analisis adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan merangkum karakteristik utama dari sekumpulan data.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, bahwa ketidak optimalan dalam pemenuhan perlindungan khusus anak korban karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan ketidak selarasan jadwal anatar Tim Unit PPA, DINSOS, dan Psikolog menjadi hambatan besar dalam pemenuhan hak. Trauma yang dialami oleh orang tua korban itu sendiri dan stigma masyarakat dalam budaya bergosip juga menjadi hambatan untuk pemulihan pasca trauma pada korban. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Ciamis yaitu mulai dari berkolaborasi dengan DINSOS dan Psikolog, mengadakan pelatihan intensif bagi orang tua dan guru, penggunaan relawan terlatih dan terverifikasi oleh Tim Unit PPA, pengawasan secara tertutup, mengadakan edukasi terhadap masyarakat, serta melakukan evaluasi bulanan.

Saran yang dapat diberikan adalah memberikan penyuluhan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan pentingnya memberikan bantuan secara psikologis kepada anak sejak dini melalui program-program pemerintah seperti program pengembangan kesehatan dan psikologis yang diberikan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bekerja sama dengan UNICEF. Saran lainnya adalah menambah kuota psikolog di Unit Perlindungan Dan Anak dengan memberikan pelayanan secara offline atau langsung serta tertutup untuk menjaga psikologis anak tetap dalam keadaan stabil.